

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota didefinisikan sebagai “living systems” yang dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi manusia terhadap lingkungannya (Castells dalam Leitmann; 28: 1999). Pada dasarnya sistem perkotaan dibentuk oleh manusia dengan aktivitasnya, dan infrastruktur penunjang ruang. Interaksi antar komponen ini akan menciptakan bentuk-bentuk penggunaan ruang berdasarkan perilaku pelaku-pelaku aktivitas dalam berlokasi (Wijaya; 57: 2003). Kota sebagai “living systems” merefleksikan adanya keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan. Dengan demikian, perubahan dalam ruang perkotaan akan menyebabkan perubahan pada kualitas lingkungan baik positif maupun negatif. Padahal lingkungan hidup secara alamiah memiliki daya dukung yang terbatas (carrying capacity) 2). Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk mengintegrasikan komponen lingkungan dalam aspek pembangunan. Isu pembangunan dan lingkungan memiliki perhatian yang luas dari berbagai negara dengan adanya komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang berwawasan lingkungan 3). Pembangunan berkelanjutan ini didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, dengan tetap menjaga kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya pula (WCED, 1987 di dalam Leitmann, 1999). Menindaklanjuti hal ini, maka perlu adanya upaya efisiensi dalam penggunaan SDA untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Daya dukung didefinisikan sebagai tingkat maksimal hasil sumber daya terhadap beban maksimum yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin merusak produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian integritas fungsional ekosistem yang relevan. Fungsi beban manusia tidak hanya pada jumlah populasi akan tetapi juga konsumsi perkapita serta lebih jauh lagi adalah faktor berkembangnya perdagangan dan industri secara cepat. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa adanya inovasi teknologi tidak meningkatkan daya dukung wilayah

akan tetapi berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Menurut McCall dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:178), daya dukung lahan merupakan penggunaan tanah dan data populasi yang sistematis. Dimana seluruh aktifitas manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup membutuhkan ruang sehingga ketersediaan lahan berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Demikian juga besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah tersebut untuk mendukung penduduknya sehingga mempengaruhi suatu standar hidup yang layak.

Salah satu strategi yang dirasakan sangat signifikan untuk mengurangi intensitas kegiatan dan kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota lama dan sekitarnya adalah memindahkan pusat pemerintahan Kota Bandung ke wilayah lain di Kota Bandung. Strategi ini dirasakan sangat tepat mengingat pusat pemerintahan merupakan salah satu zona dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Selain itu, keberadaan pusat pemerintahan di kawasan padat ini sudah sangat tidak efisien, jumlah pegawai yang semakin bertambah, kebutuhan parkir yang tinggi sedangkan lahan terbatas. Faktor lain adalah lokasi pusatnya yang berjauhan dengan kantor-kantor pemerintahan lainnya di Kota Bandung sehingga menghambat koordinasi dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja.

Saat ini perkantoran pemerintahan Kota Bandung tersebar di beberapa lokasi antara lain: Jalan Wastukencana, Jalan Cianjur, Jalan Tamansari, Jalan Sadang Serang, Jalan Ambon, Jalan Kawalayaan, Jalan Leuwi Panjang dan Jalan Ahmad Yani. Hal ini mendasari wacana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bandung sebagai salah satu upaya pengumpulan perkantoran pemerintahan dalam satu lokasi. Berdasarkan Perda RTRW Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 ditetapkan pusat primer ke-2 Kota Bandung yaitu di Kawasan Gedebage yang terletak di Wilayah Bandung bagian timur. Sebagai salah satu pusat kota di Bandung, pengembangan Wilayah Gedebage masih belum terlaksana secara optimal. Strategi pemindahan pusat pemerintahan Kota Bandung sangat bersinergi dengan rencana pengembangan Gedebage. Dengan adanya pusat pemerintahan di Gedebage ini diharapkan menstimulan pembangunan infrastruktur dan sarana perkotaan di kawasan ini.

Dengan terbentuknya Kecamatan Gedebage tersebut, maka secara otomatis akan terjadi perubahan struktur ruang dan pola ruang Kecamatan Gedebage Bandung Timur . Perubahan struktur tata ruang dan pola ruang tersebut akan memberikan dampak terhadap perubahan – perubahan pada sektor – sektor lain dalam pertumbuhan dan perkembangan Kecamatan Gedebage Bandung Timur pada masa yang akan datang. Perkembangan Kecamatan Gedebage hingga saat ini diwujudkan oleh sinergi dan saling keterkaitan perkembangan fisik, penduduk, dan sosial ekonomi pada ruang Kawasan Gedebage. Perkembangan pada ruang wilayah, yang secara teknis berupa struktur dan pola pemanfaatan ruang yang didukung oleh sarana dan prasarana, di satu pihak telah mewujudkan konfigurasi ruang yang hidup dan harus dilanjutkan ke masa depan (prinsip pembangunan berkelanjutan), namun di lain pihak juga memunculkan permasalahan yang dihadapi dan harus diatasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengajukan judul tugas akhir, yaitu : **Kajian Daya Dukung Lahan Guna Meningkatkan Fungsi Gedebage Sebagai Kawasan Pemerintahan Ke-2 .**

1.2. Isu Strategis dan Isu Permasalahan di Kecamatan Gedebage

1.2.1. Isu Strategis

Dimana dalam hal ini terdapat isu strategis untuk Kecamatan Gedebage, sehingga memungkinkan untuk dikajinya daya dukung dan daya tampung kawasan di Kecamatan Gedebage untuk melihat apakah Kawasan tersebut dapat mendukung kegiatan yang ada di Kecamatan Gedebage. Berikut isu strategis yang terdapat di Kecamatan Gedebage:

1. Kawasan Gedebage ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. (RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031)
2. Sebagai penetapan Kawasan Strategis kota Bandung (RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031).
3. Dimana Kawasan Gedebage berfungsi sebagai Kawasan Resapan Air (RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031).

1.2.2. Isu Permasalahan

Dalam pengembangan kawasan pemerintahan gedebage terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan dalam pengembangan kawasan Gedebage termasuk Kawasan Pemerintahan. Dimana isu permasalahan yang ada di kecamatan gedebage diantaranya :

- Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kawasan Gedebage termasuk Kawasan Pemerintahan adalah faktor kebencanaan karena dapat menjadi kendala atau limitasi dalam pengembangannya. Kawasan Gedebage memiliki potensi terjadinya banjir dan gempa. Adanya potensi bencana banjir di Kawasan Gedebage disebabkan oleh permukaan tanah yang relatif datar dan memiliki jenis tanah alluvial sehingga mudah tergerus air dan dapat menyebabkan banjir dengan tingkat sedimentasi yang tinggi. Untuk kelurahan yang sering terjadi banjir yaitu kelurahan rancabolang dan cimencrang dengan ketinggian 50 centimeter.
- Selain itu Kawasan Gedebage juga termasuk ke dalam wilayah dengan pola dan intensitas hujan rapat serta merupakan titik lahan terendah dan merupakan pertemuan beberapa alur sungai dan memiliki daerah tingkapan air yang luas. Di samping banjir Kawasan Gedebage memiliki potensi bencana gempa. Hal ini dikarenakan Gedebage (umumnya seluruh Kota Bandung) merupakan wilayah yang dikelilingi oleh sumber-sumber gempa aktif dengan intensitas relatif tinggi.
- Alokasi komponen ruang, khususnya untuk industri, perkantoran dan perdagangan dinilai masih tersebar tidak teratur dan mengisi ruang kawasan Gedebage secara acak. Hal ini juga mengakibatkan pola ruang di Gedebage saat ini menjadi tidak jelas dan cenderung bersampur antar komponen ruang yang ada (mix landuse).

Berdasarkan rumusan persoalan diatas maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik dan kondisi lahan di kecamatan gedebage ?
2. Bagaimana kemampuan lahan yang ada di kawasan pemerintahan ?
3. Bagaimana arahan pengembangan kawasan pemerintahan gedebage ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam studi ini di tentukan tujuan dan sasaran yang ingin di capai, untuk mengarahkan dan mempermudah dalam penganalisisan masalah-masalah yang ada.

1.3.1 Tujuan

Tujuan studi ini adalah teridentifikasinya arahan daya dukung lahan guna menampung kemampuan lahan dan rencana pemanfaatan ruang kawasan pemerintah gedebage. .

1.3.2 Sasaran

Untuk Mencapai tujuan diatas, maka disusun beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya daya dukung lahan dilihat dari kemampuan lahan dan kesesuaian lahan pada kawasan pemerintahan sebagai lahan potensial untuk di kembangkan.
2. Teridentifikasinya potensi dan masalah terkait daya dukung lahan yang didukung dengan kemampuan lahan , kesesuaian lahan serta rencana pola ruang di Kawasan Gedebage.
3. Teridentifikasinya arahan pengembangan terkait daya dukung lahan kawasan pemerintahan gedebage

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Gedebage adalah 979,308 ha, yang mana kelurahan yang memiliki daerah yang lebih luas dibanding dengan kelurahan yang lain adalah Kelurahan Cisaranten kidul dengan luas sebesar 426,711 ha, dan kelurahan yang memiliki wilayah yang terkecil dibanding kelurahan yang lain adalah Kelurahan Rancanumpang dengan luas sebesar 115 ha. Terdapat 4 kelurahan di gedebage: 1. Kelurahan Rancabolang. 2. Kelurahan Rancanumpang. 3. Kelurahan Cisaranten Kidul. 4. Kelurahan Cimincrang.

Kawasan pusat pemerintahan Kota Bandung akan dikembangkan di atas lahan seluas 33,3 Ha. Lahan tersebut berlokasi di Kelurahan

Cimincrang, Kecamatan Gedebage. Lokasi pengembangan kawasan pusat pemerintahan berbatasan dengan Kantor POLDA JABAR dan Kampus UIN di sebelah Utara, Jalan Cimincrang di sebelah Timur, rel kereta api di sebelah Selatan, dan sawah yang akan dikembangkan menjadi kawasan komersial di sebelah Barat. Kawasan tersebut juga merupakan lokasi pengembangan Transit Oriented Development di PPK Gedebage sehingga merupakan lokasi yang sangat strategis. Kecamatan Gedebage secara administratif berbatasan dengan daerah kabupaten/kota dan kecamatan lainnya yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cinambo
- Sebelah selatan : Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Rancasari
- Sebelah Timur : Kecamatan Panyileukan

Tabel I.1
Luas Wilayah Per Kelurahan Di Kecamatan Gedebage

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Rancabolang	276,57
2	Rancaumpang	115
3	Cisaranten Kidul	426,711
4	Cimincrang	161,027
Jumlah		979,308

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2015

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah materi yang terkait dengan Daya Dukung Lahan Kawasan Pemerintahan Gedebage, berikut adalah substansi sebagai batasan materi penelitian:

- Identifikasi kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang meliputi kondisi fisik lahan yaitu topografi, geologi, rawan bencana, hidrologi dan klimatologi
- Identifikasi masalah dan potensi terkait daya dukung lahan berdasarkan rencana pola ruang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan
- Identifikasi arahan pengembangan terkait daya dukung lahan berdasarkan rencana pola ruang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kawasan Gedebage

1.5 Batasan Studi

Terdapat beberapa batasan materi dan batasan wilayah yang dikaji dalam studi ini, sebagai berikut:

1.5.1 Batasan Wilayah

Dalam studi ini wilayah yang di kaji berdasarkan isu strategis kawasan pemerintahan maka diambil Kecamatan Gedebage dengan 4 kelurahan yaitu kelurahan rancabolang, kelurahan rancaumpan, kelurahan cisaranten kidul dan kelurahan cimincrang.

1.5.2 Batasan Materi

Adapun batasan studi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Dalam studi ini mencakup 2 aspek yang terkait meliputi aspek fisik dan penggunaan lahan
- Aspek tersebut hanya dapat menghasilkan karakteristik daya dukung lahan yang dapat membantu menganalisis didalam studi tersebut.
- Hasil akhir studi ini adalah hanya mengidentifikasi potensi dan masalah dan identifikasi arahan pengembagn kawasan pemerintahan berdasarkan daya dukung guna untuk mengurangi permasalahan yang ada di Kawasan Pemerintah Gedebage.

1.6 Metode Penelitian

Dalam studi ini di lakukan dua metedologi yaitu metedologi pendekatan studi, metedologi pengumpulan data dan metedologi analisis data, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan Studi

Metode pendekatam studi yang dilakukan dalam Studi kajian daya dukung lahan kawasan pemerintahan gedebage di awali dari peninjauan terhadap latar belakang isu strategi dan isu permasalahan di wilayah studi, selanjutnya secara rinci diuraikan kedalam beberapa langkah-langkah, yaitu :

- Pendekatan terhadap pola ruang kawasan pemerintahan, pendekatan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan lahan dan kesesuaian lahan.
- Arahan pengembangan kawasan pemerintahan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan arahan pengembangan terhadap kawasan pemerintahan dalam pemanfaatan lahan guna mendukung aktifitas didalam kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Gedebage.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui survey yang secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu :

- Survei Primer
Observasi lapangan, dilakukan dengan mengamati keadaan wilayah studi, letak fasilitas kegiatan sosial budaya kependudukan, masalah, potensi, dan lainnya,
- Survei Sekunder
Data survey diperoleh dari data-data dan literatur yang ada di instansi terkait serta buku-buku yang kaitannya dengan survey sekunder itu sendiri. Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir.

1.6.3 Metode Analisis

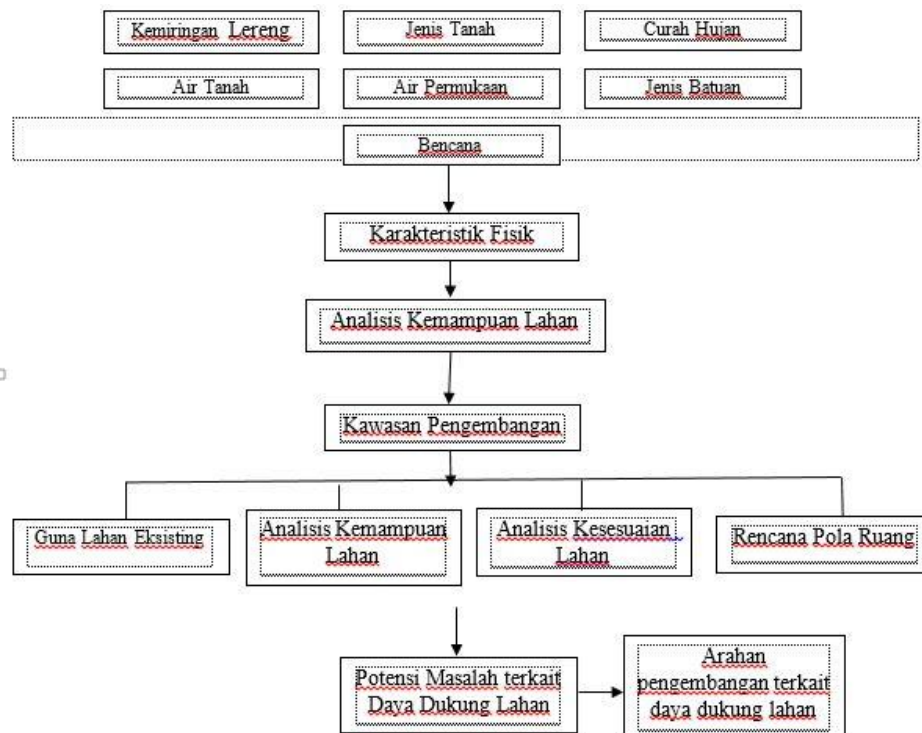
Berdasarkan data yang terkumpul, maka analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Berikut metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut .

Tabel I.2
Matriks Metodologi Analisis

Sasaran	Metode Analisis	Data yang digunakan	Output
1. Teridentifikasinya kemampuan lahan dan kesesuaian lahan pada kawasan	Metode Deskriptif Kualitatif • Analisis Kemampuan	• Data Kondisi fisik dan tata guna	Gambaran mengenai daya dukung lahan terhadap kawasan pemerintahan. di

Sasaran	Metode Analisis	Data yang digunakan	Output
pemerintahan sebagai lahan potensial untuk dikembangkan. 2.	n Lahan • Analisis Kesesuaian Lahan	lahan	Gedebage
3. Teridentifikasinya potensi dan masalah terkait daya dukung lahan di Kawasan Gedebage	Metode Deskriptif • Evaluasi antara kemampuan lahan, kesesuaian dan rencana tata ruang	- Rencana Pola Ruang - Kemampuan Lahan - Kesesuaian Lahan	Teridentifikasinya potensi dan masalah terkait dengan daya dukung lahan
1. Teridentifikasinya arahan terkait potensi dan masalah berdasarkan daya dukung lahan	Metode Deskriptif	Data Hasil Identifikasi dan Analisis Ruang Kawasan	Memberikan arahan pengembangan terhadap kawasan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung lahan kawasan.

Gambar 1.2
Kerangka Analisis



Berdasarkan kerangka analisis di atas bahwa untuk melihat daya dukung lahan di kawasan gedebage yaitu dibutuhkan beberapa data dasar fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, hidrologi, geologi dan bencana sehingga data tersebut dapat menggambarkan karakteristik kondisi fisik di kawasan pemerintahan gedebage. Kemudian data tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan lahan yang terdiri dari beberapa SKL (7 SKL), sehingga 7 SKL tersebut dapat di overlay menjadi satu yang akan menggambarkan kemampuan lahan di kawasan pemerintahan gedebage. Kemudian dilakukannya evaluasi guna lahan eksisting dengan rencana pola ruang sehingga akan terlihat kesesuaian lahan. Sehingga untuk potensi masalah terkait daya dukung lahan dapat dilihat dari kemampuan lahan, kesesuaian lahan, kemudian akan terkait dengan arahan pengembangan terkait daya dukung lahan.

Dalam Kajian Daya Dukung Lahan Kawasan Pemerintahan di Gedebage metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : Analisis superimpose (overlay) merupakan suatu teknik analisis dengan cara menumpang tindihkan data peta. Dengan analisis ini dapat diketahui kondisi suatu wilayah berdasarkan data dan informasi yang ada. Dalam penelitian ini analisis superimpose digunakan untuk mengetahui daya dukung lahan dan daya dukung berdasarkan kawasan resapan air. Metode overlay sering disebut metode penampalan peta. Metode ini sangat baik dipergunakan untuk mengadakan kajian keruangan, hasil inventarisasi terhadap komponen tanah meliputi data sifat fisik di analisis untuk dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi kemampuannya. Data batuan, kelerangan, curah hujan dapat digunakan secara keruangan melalui analisis ini sehingga dapat diketahui lokasi-lokasi yang memiliki kemampuan dan daya dukung terhadap lingkungan. Metode ini menggunakan beberapa peta tematik yang kemudian digambarkan atau ditampalkan di dalam peta dasar. Prosedur analisis superimpose adalah sebagai berikut:

1. Membuat peta dasar dari wilayah studi.
2. Membuat peta-peta lain sesuai kebutuhan dalam studi.
3. Menentukan kriteria sesuai dengan kebutuhan studi.

4. Melakukan overlay antar peta yang satu dengan yang lain sesuai kebutuhan.

Tahapan pengolahan data dan peta yang akan diproses dengan menggunakan teknik overlay/*superimpose* disajikan pada diagram berikut:

A. Analisis Fisik Kemampuan Lahan

Dalam menganalisis Fisik Kemampuan Lahan di gunakan pedoman Permen PU No.20/PRT/M/2007 yang didalamnya menjelaskan langkah yang harus di lakukan setelah tahap pengumpulan data yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam analisis ini, banyak menggunakan overlay berbagai peta yang dimiliki. Dalam analisis Kemampuan Lahan ini dilakukan 6 Satuan Kemampuan Lahan,yaitu :

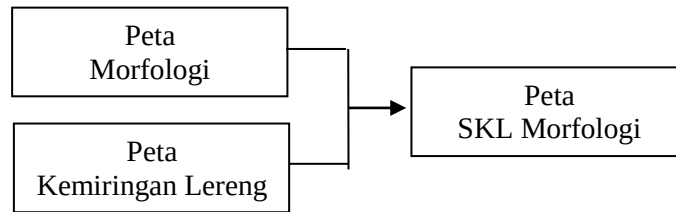
1. SKL Morfologi
2. SKL Kestabilan Lereng
3. SKL Kestabilan Pondasi
4. SKL Drainase
5. SKL Ketersediaan Air
6. SKL Bencana Banjir
7. SKL Bencana Gerakan Tanah

Apabila SKL diatas telah selesai dikerjakan, maka langkah selanjutnya yaitu semua peta SKL yang telah selesai dikerjakan di beri skor dan di overlay sehingga akan menghasilkan peta kemampuan lahan wilayah tersebut.

1) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Analisis kemampuan lahan secara morfologi dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk bentang alam pada suatu wilayah perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Analisis kemampuan lahan secara morfologi berupa peta satuan kemampuan lahan (SKL) morfologi yang merupakan hasil dari *overlay* peta morfologi dan peta kemiringan lereng.

Gambar 1.3
Skema Pembuatan Peta SKL Morfologi



Adapun kriteria teknis yang digunakan dalam penentuan Satuan Kemampuan Lahan Morfologi adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3
Pembobotan SKL Morfologi

PETA INPUT				PETA OUTPUT	
Peta Morfologi	Nilai	Peta Kemiringan Lereng	Nilai	SKL Morfologi	Nilai
Datar	5	0-8%	5	Kemampuan Morfologi Tinggi	5
Relatif Datar	3	8-25%	3	Kemampuan Morfologi Sedang	3
Perbukitan	1	>25%	1	Kemampuan Morfologi Rendah	1

Sumber : Permen PU No.20/PRT/M/2007

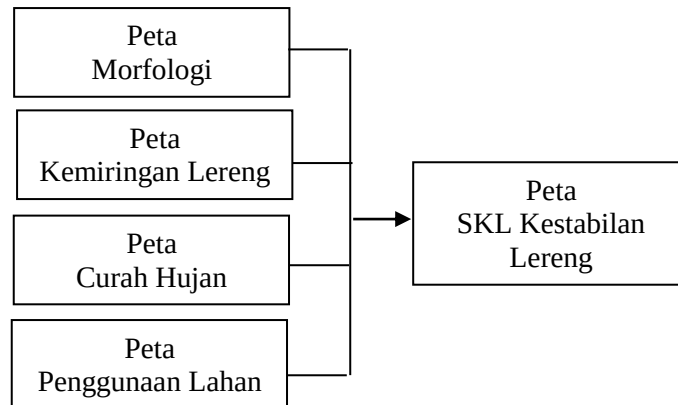
Kemampuan morfologi yang rendah disebabkan karena kondisi bentang alam yang memang sulit untuk dilakukan pembangunan di atasnya, seperti pegunungan atau lereng yang sangat curam sehingga kemampuan pengembangannya sangat rendah dan sulit dikembangkan atau tidak layak untuk dikembangkan. Lahan seperti ini sebaiknya direkomendasikan sebagai wilayah lindung atau budidaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif manusia dalam jumlah besar. Sedangkan kemampuan morfologi tinggi menunjukkan bahwa kondisi morfologis lahan tidak kompleks. Hal ini berarti tanah jenis ini relative datar dan mudah dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan budidaya.

2) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Analisis kemampuan lahan dilihat dari sisi kestabilan lereng ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemantapan lereng di wilayah / kawasan pengembangan dalam menerima beban kontruksi pembangunan di atasnya.. Analisis kemampuan lahan dilihat dari sisi kestabilan lereng ini ditampilkan dalam bentuk peta satuan

kemampuan lahan (SKL) kestabilan lereng yang merupakan hasil dari *overlay* peta topografi dan peta kemiringan lereng.

Gambar 1.4
Skema Pembuatan Peta SKL Kestabilan Lereng



Setelah melakukan *overlay* dari empat peta tersebut kemudian dilakukan klasifikasi untuk mengetahui kestabilan lereng di WP Selatan Kabupaten Lebak. Klasifikasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada Permen PU no 20 th 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek sebagai berikut.

Tabel I.4
Pembobotan SKL Kestabilan Lereng

Morfologi	Lereng (%)	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
Perbukitan	> 25	Sama	Kebun, Rumput	Rendah	1
Relatif Datar	8 - 25	Sama	Sawah, RTH	Sedang	3
Datar	0 – 8	Sama	Terbangun	Tinggi	5

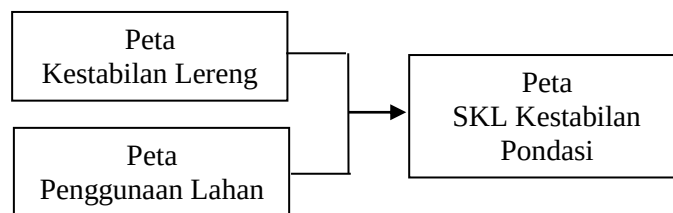
Sumber : Permen PU No.20/PRT/M/2007

Kestabilan lereng berarti suatu wilayah dapat dikatakan stabil atau tidak berdasarkan kemiringan lereng dan topografi di lahan tersebut. Bila suatu kawasan memiliki kestabilan lereng rendah, maka kemungkinan besar lahan tersebut memiliki bahaya longsor yang tentunya tidak aman dikembangkan untuk permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang membutuhkan aktifitas manusia dalam jumlah besar. Namun kawasan ini dapat digunakan untuk hutan, perkebunan, atau resapan air.

3) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

SKL kestabilan pondasi berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Peta SKL ini merupakan *overlay* dari peta topografi dan peta kemiringan lereng.

Gambar 1.5
Skema Pembuatan Peta SKL Kestabilan Pondasi



Tabel I.5
Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

SKL Kestabilan Lereng	Penggunaan Lahan	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
Rendah	Kebun, Rumput, Sawah, RTH	Daya Dukung Kestabilan Pondasi Rendah	1
Sedang	Terbangun	Daya Dukung Kestabilan Pondasi Sedang	3
Tinggi	Terbangun	Daya Dukung Kestabilan Pondasi Tinggi	5

Sumber : Permen PU No.20/PRT/M/2007

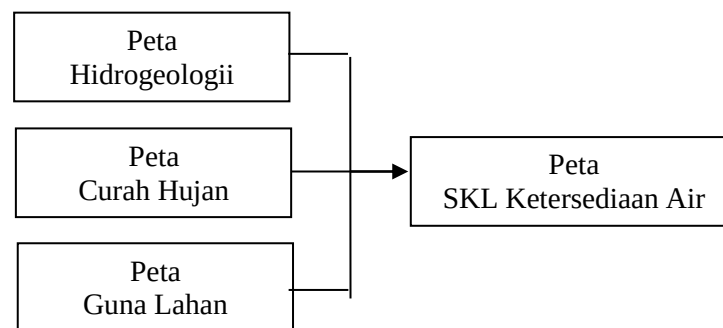
Kestabilan pondasi artinya kondisi lahan yang mendukung stabil atau tidaknya suatu bangunan atau kawasan terbangun. SKL ini juga diperlukan untuk memperkirakan jenis pondasi wilayah yang terbangun. Kestabilan pondasi tinggi berarti wilayah tersebut akan stabil untuk pondasi apapun atau untuk segala jenis pondasi. Kestabilan pondasi kurang berarti wilayah tersebut kurang stabil untuk berbagai bangunan, namun mungkin untuk jenis pondasi tertentu, bisa lebih stabil, seperti pondasi cakar ayam. Sedangkan kestabilan pondasi rendah berarti wilayah tersebut kurang stabil untuk berbagai bangunan. Peta kestabilan pondasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan peta kestabilan lereng. Daerah – daerah yang memiliki lereng landai atau tidak memiliki lereng sama sekali jelas memiliki

pondasi yang lebih baik untuk pembangunan, sedangkan daerah-daerah yang memiliki lereng curam jelas memiliki pondasi yang lebih tidak stabil.

4) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

SKL ketersediaan air berfungsi untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air, guna pengembangan kawasan budidaya di atasnya.

Gambar 1.6
Skema Pembuatan Peta SKL Ketersediaan Air



Tabel I.6
Pembobotan SKL Ketersediaan Air

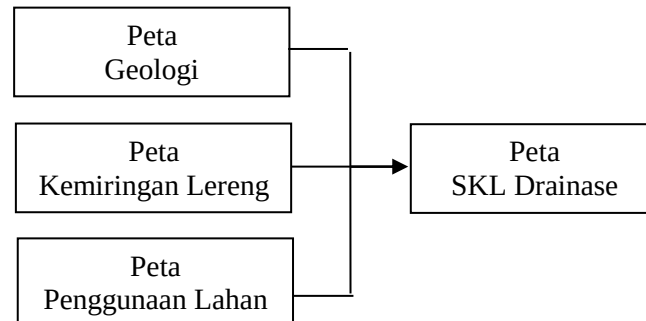
PETA INPUT						PETA OUTPUT	
Peta Hidrogeologi	Nilai	Peta Curah Hujan	Nilai	Peta Guna Lahan	Nilai	SKL Ketersediaan Air	Nilai
Akuifer Dangkal Dengan Produktivitas Sedang	5	> 3000	5	Tidak terbangun	5	Tinggi	5
Akuifer Dangkal Dengan Produktivitas Sedang	3	2000 - 3000	3	Terbangun	1	Sedang	3
Akuifer Dangkal Dengan Produktivitas Sedang	1	0 - 2000	1	Terbangun	1	Rendah	1

Sumber : Permen PU No.20/PRT/M/2007

5) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase

SKL drainase berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. Peta SKL ini merupakan *overlay* dari peta topografi, peta kemiringan lereng, dan peta curah hujan.

Gambar 1.7
Skema Pembuatan Peta SKL Drainase



Tabel I.7
Pembobotan SKL Drainase

Geologi	Lereng %	Penggunaan Lahan	SKL Drainase	Nilai
Lanau Lempungan Dan Lempung	15- 40	Kebun, rumput, sawah, RTH	Tinggi	5
Lempungan Dan Lempung Pasiran	8 - 15	Semua	Sedang	3
Lempungan Dan Lempung Pasiran	0 - 8	Semua	Rendah	1

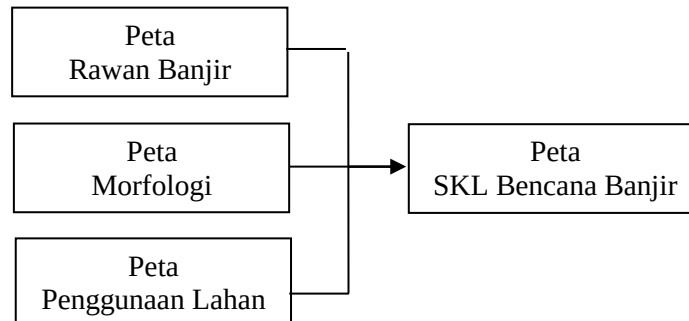
Sumber : Permen PU No.20/PRT/M/2007

Setiap tingkatan / klasifikasi drainase berkaitan dengan mudah atau tidaknya air mengalir. Drainase tinggi berarti bahwa air mudah mengalir dan kecil kemungkinan menimbulkan genangan. Kemampuan drainase rendah berarti bahwa air sulit mengalir sehingga berpotensi besar menimbulkan genangan.

6) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Banjir

SKL terhadap bencana banjir berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana banjir, sehingga SKL ini diperlukan untuk menghindari / mengurangi kerugian dan korban akibat bencana yang mungkin akan terjadi. Peta SKL ini merupakan *overlay* dari peta rawan banjir, morfologi dan peta penggunaan lahan.

Gambar 1.8
Skema Pembuatan Peta SKL Bencana Banjir



Tabel I.8
Pembobotan SKL Bencana Banjir

PETA INPUT						PETA OUTPUT	
P. Rawan Banjir	Nilai	P. Morfologi	Nilai	P. Guna Lahan	Nilai	SKL Bencana Banjir	Nilai
Daerah banjir	1	Pegukkkknungan	5	Tidak terbangun	2	Sangat Tinggi (9)	5
		Perbukitan-pegunungan	4		2	Tinggi (8)	4
Daerah non-banjir	2	perbukitan	3	Terbangun	1	Sedang (7)	3
		Relatif datar	2		1	Rendah (5-6)	2
		datar	1		1	Sangat Rendah (3-4)	1

Sumber : Permen PU No.20/PRT/M/2007

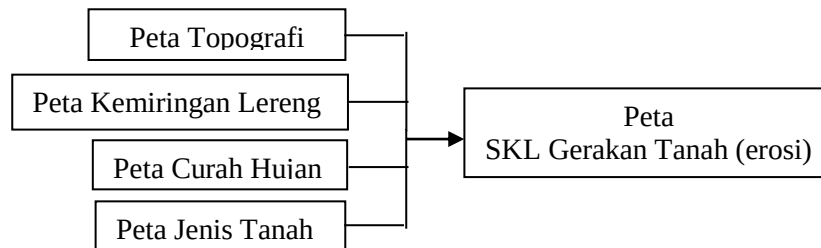
Potensi bencana banjir tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang termasuk ke dalam daerah rawan banjir dan merupakan daerah dengan morfologi datar. Potensi bencana banjir rendah berarti wilayah tersebut merupakan wilayah yang termasuk ke dalam daerah rawan banjir dan merupakan daerah dengan morfologi pegunungan, atau mungkin wilayah ini merupakan daerah tidak rawan banjir.

7) Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Gerakan Tanah (erosi)

Penyusunan peta SKL terhadap gerakan tanah (erosi) berfungsi untuk mengetahui daerah-daerah yang berpotensi atau telah mengalami kikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah hilir. Erosi berkaitan dengan mudah atau tidaknya lapisan tanah terbawa air atau angin. Erosi tinggi berarti lapisan tanah mudah terkelupas dan terbawa oleh angin dan air. Erosi rendah berarti lapisan tanah sedikit terbawa

oleh angin dan air. Sedangkan daerah yang tidak ada erosi berarti di daerah tersebut tidak ada pengelupasan lapisan tanah.

Gambar 1.9
Skema Pembuatan Peta SKL Gerakan Tanah (erosi)



Tabel I.9
Pembobotan SKL Gerakan Tanah (Erosi)

PETA INPUT								PETA OUTPUT	
PETA topografi	Nilai	PETA Lereng	Nilai	PETA Curah Hujan	Nilai	PETA Jenis Tanah	Nilai	SKL Longsor	Nilai
0 – 300	1	0 – 8	1	0 – 1000	1	aluvial	1	Sangat Tinggi (<8)	5
300 - 600	2	8 – 15	2	1000 – 2000	2	Latosol	2	Tinggi (9-11)	4
600 – 900	3	15 - 25	3	2000 – 3000	3	Mediteran	3	Sedang (12-14)	3
900 - 1200	4	25 - 40	4	3000 – 4000	4	Andosol, podsolik	4	Rendah (15-17)	2
> 1200	5	> 40	5	> 4000	5	rensina	5	Sangat Rendah (18-20)	1

Sumber: Permen PU No.20/PRT/M/2007

- **Analisis Kemampuan Lahan**

Analisis kemampuan lahan merupakan analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk keperluan pengembangan Kawasan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi analisis kesesuaian lahan di Kawasan Pemerintahan Kecamatan Gedebage Analisis kemampuan lahan ini dilakukan dengan cara meng-*overlay* seluruh peta Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang telah dibuat.

Skoring Kemampuan Lahan dan Klasifikasi Pengembangan, Pembuatan peta nilai kemampuan lahan merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot dengan melakukan superimpose setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh dari hasil pengalihan nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian

diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan secara kumulatif.

Total nilai dari scoring kemampuan lahan dibuat beberapa kelas yang memperhatikan nilai minimum dan maksimum dari keseluruhan nilai. Dari scoring kemampuan lahan diperoleh nilai minimum yang mungkin didapat adalah 35, sedangkan nilai maksimum yang mungkin didapat adalah 155. Dengan demikian dapat dibuat klasifikasi pengembangan berdasarkan kelas kemampuan lahan yang dikelompokkan menurut selang nilai dari scoring kemampuan lahan.

Tabel I.10
Pembobotan Total SKL

SKL Morfologi	SKL Kestabilan Lereng	SKL Kestabilan Pondasi	SKL Ketersediaan Air	SKL Terhadap Erosi	SKL Drainase	SKL Bencana Alam
Bobot : 5	Bobot : 5	Bobot : 3	Bobot : 5	Bobot :3	Bobot : 5	Bobot : 5
5	5	3	5	3	25	25
15	15	9	15	9	15	15
25	25	15	25	15	5	5

Tabel I.11
Klasifikasi Pengembangan

NILAI TOTAL	KELAS KEMAMPUAN LAHAN	KLASIFIKASI PENGEMBANGAN
87-110	Kelas C	Kemampuan Pengembangan Rendah
111-134	Kelas B	Kemampuan Pengembangan Sedang
135-158	Kelas A	Kemampuan Pengembangan Tinggi

Sumber : Permen PU No 20 Tahun 2007

Interval : $155-87 / 3 = 22.6$

Tabel di atas menunjukkan klasifikasi pengembangan, dan kemampuan lahan ini berdasarkan penghitungan scoring dan klasifikasi pengembangan yang telah ditentukan.

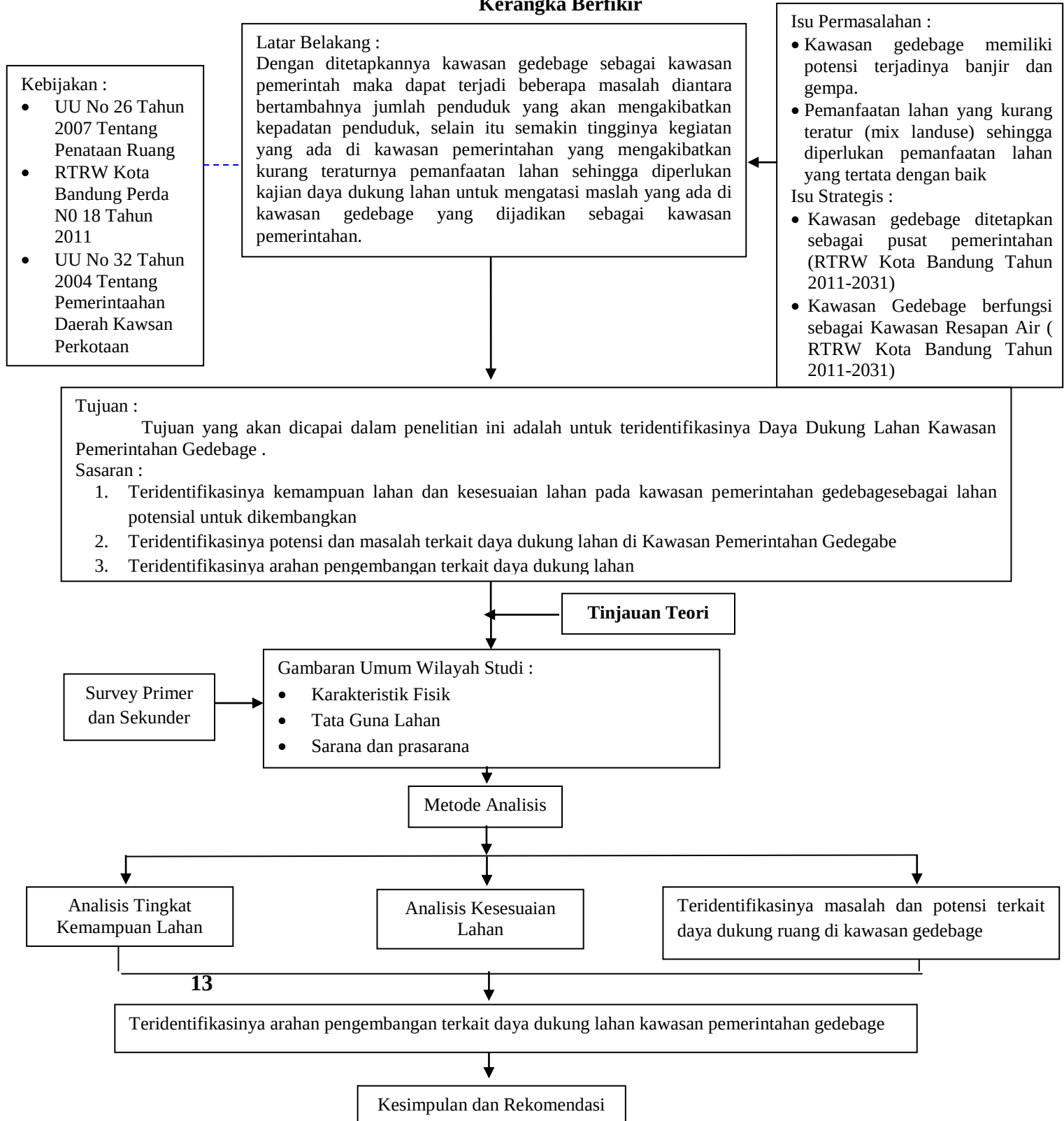
B. Analisis Fisik Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan disini bersifat evaluasi dimana evaluasi kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (Sitorus, 1998). Menurut Husein (1981), evaluasi lahan adalah usaha untuk mengelompokkan tanah-tanah tertentu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelas kesesuaian lahan untuk suatu areal dapat berbeda tergantung dari penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan.

Fungsi kegiatan evaluasi lahan adalah memberikan pengertian tentang hubungan antara kondisi lahan dengan penggunaannya serta memberikan kepada perencana berbagai perbandingan dan alternatif pilihan penggunaan yang dapat diharapkan berhasil. Dimana dalam hal ini analisis kesesuaian di bagi menjadi 2 yaitu analisis kesesuaian rencana pola ruang dengan kemampuan lahan dengan analisis kesesuaian rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting sehingga dalam 2 analisis tersebut dapat mengeluarkan potensi masalah terkait daya dukung lahan kawasan pemerintahan gedebage. Untuk datayang di butuhkan dalam analisis ini seperti peta kemampuan lahan, peta rencana pola ruang dan peta penggunaan lahan.

1.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.10
Kerangka Berfikir



1.8 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini menjelaskan mengenai pendahuluan, tinjauan teori, gambaran umum wilayah, analisis daya dukung lahan kawasan pemerintahan gedebage, serta potensi dan masalah kawasan pemerintahan berdasarakan daya dukung lahan dan kesimpulan.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasara, ruang lingkup wilayah dan materi, metode penelitian yang mencakup metode pengumpulan data, metode analisis, dan kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori

Menjelaskan teori – teori yang terkait dengan studi yang dilaksanakan terutama tentang Kswasan Perkotan, Kawasan Pemerintahan dan Daya Dukung Lahan.

BAB III Gambaran Umum Wilayah

Menjelaskan kondisi fisik dan penggunaan lahan Kawasan Pemerintah Gedebage.

BAB IV Analisis Daya Dukung Lahan Kawasan Gedebage Bandung Timur

Bab ini menjelsakan analisi daya dukung lahan bedasarkan Analisis kemampuan lahan dan kesesuaian lahan Berdasarkan rencana pola pemanfaatan ruang Kota di kawasan pemerintah gedebage

BAB V Kesimpulan

Bab ini berupaya menarik kesimpulan dari hasil studi dan kemudian memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah.